JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin P-ISSN: 3063-427X
Vol. 3, No. 3 Oktober 2026, hal. 451-474 E-ISSN: 3063-2706
DOI: https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i3.574

Digital Asabiyyah di Media Sosial: Polarisasi Kelompok dan Kooptasi Homeless Media oleh Otoritas Negara

Ryan Juliansyah[1]*, Ade Irma[2]
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: juliansyahryan22@gmail.com*

Abstrak

Transformasi ekosistem komunikasi publik di Indonesia ditandai oleh pergeseran dari dominasi media massa konvensional menuju media baru yang terdesentralisasi, termasuk fenomena *homeless media* atau media nirkantor. Perubahan ini melahirkan ruang diskursus baru yang mendorong terbentuknya *Digital Asabiyyah*, yakni solidaritas sosial berbasis jaringan digital yang berpengaruh terhadap polarisasi politik dan sentimen kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontroversi kerja sama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dengan sejumlah *homeless media* melalui Indonesia New Media Forum (INMF) pada Mei 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif Sosiologi Komunikasi, teori *Network Society* Manuel Castells, dan konsep *Asabiyyah* Ibnu Khaldun. Data dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada dimensi makro, meso, dan mikro. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran strategi komunikasi negara dari pola defensif menuju pendekatan agresif-penetratif. Pada tingkat meso, terjadi perebutan *network-making power* melalui upaya penetrasi ke dalam ruang digital audiens organik. Pada tingkat mikro, penggunaan bahasa yang paternalistik dan elitis memunculkan resistensi dari media independen. Dalam perspektif etika komunikasi Islam, praktik kooptasi media yang tidak transparan bertentangan dengan prinsip *qaulan sadida* dan berpotensi merusak integritas ruang publik. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi struktural terhadap *homeless media* tidak hanya gagal mengendalikan otonomi sipil, tetapi juga berisiko memperkuat polarisasi dan mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital.

Kata kunci: Homeless Media; Digital Asabiyyah; Analisis Wacana Kritis; Network Society; Komunikasi Pemerintah

Pendahuluan

Dinamika sosiologi komunikasi di era milenium ketiga telah mencapai titik bifurkasi yang tidak dapat diubah kembali. Transformasi mendalam dalam lanskap komunikasi publik di Indonesia dan secara global didorong oleh akselerasi penetrasi internet dan disrupsi teknologi media sosial (Frizka Utami dkk., 2025). Arsitektur informasi yang selama puluhan tahun dikuasai secara vertikal oleh media arus utama (mainstream media) dengan struktur keredaksian yang hierarkis, permodalan raksasa, dan

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh

kontrol regulasi yang ketat, kini mengalami fragmentasi radikal. Kekuasaan untuk mendefinisikan realitas publik kini harus didistribusikan, bahkan diperebutkan secara asimetris, dengan entitas-entitas media baru yang lahir dan tumbuh secara eksklusif di ekosistem platform digital.

Entitas-entitas kontemporer ini secara konseptual sering dikategorikan sebagai homeless media (media tunawisma) (Adji, 2026). Istilah ini merujuk pada platform kurasi konten, agregator berita, dan akun penyebar meme yang tidak memiliki infrastruktur redaksi konvensional, tidak berafiliasi dengan konglomerasi pers tradisional, dan bahkan tidak memiliki situs web atau aplikasi mandiri. Mereka mendistribusikan narasi, informasi, dan diskursus publik secara langsung melalui kanal-kanal pihak ketiga seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), YouTube, hingga aplikasi pesan instan seperti Telegram dan WhatsApp. Melalui gaya komunikasi yang kasual, pendekatan yang satir, dan relevansi yang kuat dengan budaya pop serta realitas keseharian (hyper-local), homeless media berhasil membangun basis pengikut yang masif, sering kali melampaui sirkulasi media massa cetak nasional.

Fenomena ini membawa implikasi sosiologis yang sangat besar. Interaksi intensif yang terjadi di kolom komentar platform homeless media menciptakan ikatan solidaritas komunal di dunia maya, yang merepresentasikan bentuk mutakhir dari apa yang digagas oleh sosiolog klasik Islam, Ibnu Khaldun, sebagai asabiyyah. Digital Asabiyyah ini mewujud dalam bentuk ikatan emosional kolektif antar-netizen yang merasa memiliki identitas, kegelisahan, dan nilai yang sama, yang terus-menerus diamplifikasi oleh algoritma platform hingga membentuk echo chamber (ruang gema) yang pekat (Raza, Aulia, & Sopian, 2025). Berbeda dengan asabiyyah pramodern yang mengandalkan hubungan nasab (darah) dan letak geografis, asabiyyah digital direkat oleh kesamaan preferensi naratif dan algoritma konsumsi media.

Kekuatan Digital Asabiyyah ini terbukti mampu mengonsolidasikan opini publik yang secara nyata berdampak pada pengambilan keputusan politik dan respons terhadap kebijakan nasional (Hafis, Hisbullah, Ibrahim, & Yusrizal, 2025; Fanani, Zakaria, & Pratomo, 2025). Mengingat signifikansi

kekuatan mobilisasi ini, otoritas kekuasaan secara niscaya tidak akan membiarkan lanskap ini berjalan tanpa intervensi. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya insiden monumental pada ranah komunikasi politik di Indonesia pada bulan Mei 2026. Insiden ini berpusat pada manuver struktural dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang berupaya merangkul dan mengooptasi entitas homeless media untuk dijadikan instrumen komunikasi strategis negara.

Pasca perombakan kabinet (reshuffle) kelima pada April 2026, Presiden membentuk struktur komunikasi yang jauh lebih ofensif. Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom RI menandai pergeseran radikal dari pola komunikasi pemerintah yang sebelumnya bersifat defensif-normatif menjadi sangat agresif-penetratif. Puncak dari manifestasi kebijakan baru ini terjadi pada tanggal 6 Mei 2026, ketika Qodari secara terbuka di hadapan pers mengklaim bahwa puluhan homeless media besar yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) termasuk di dalamnya akun-akun raksasa seperti Folkative, Indozone, Dagelan, Bapak2ID, Kok Bisa?, hingga USS Feeds dan Menjadi Manusia telah resmi menjadi mitra komunikasi pemerintah (Harian Disway, 2026; Kompas.com, 2026).

Klaim sepihak ini seketika memicu kontroversi berskala nasional. Upaya kooptasi tersebut tidak hanya memancing kritik keras dari para pengamat komunikasi dan perwakilan legislatif seperti Amelia Anggraini dari Komisi I DPR RI yang menyoroti potensi konflik kepentingan dan ancaman terhadap akuntabilitas publik, tetapi juga memicu resistensi langsung dari para pelaku media itu sendiri. Sejumlah akun, yang paling vokal diwakili oleh pendiri Bapak2ID, James Jan Markus, secara terbuka membantah pernyataan Kepala Bakom RI dan menolak klaim kemitraan tersebut (Tempo.co, 2026a, 2026b).

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengurai kompleksitas pertarungan wacana antara negara dan komunitas digital dengan presisi akademis. Tulisan ini yang dikonstruksi dalam kerangka kajian komunikasi Islam mengajukan tesis bahwa kontroversi homeless media bukan sekadar anomali administratif,

melainkan sebuah benturan paradigmatik perebutan hegemoni makna. Menggunakan perpaduan teoretis antara Network Society (Manuel Castells), Sosiologi Komunikasi tentang efek Echo Chamber, dan filosofi Asabiyyah Ibnu Khaldun, laporan penelitian ekstensif ini akan membedah anatomi konflik tersebut menggunakan instrumen Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Tujuan sentralnya adalah untuk mengurai bagaimana bahasa dikonstruksi, direproduksi, dan dimanipulasi oleh entitas negara untuk menegaskan dominasi identitas otoritasnya atas ruang sipil, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap polarisasi masyarakat di ruang siber.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis untuk memahami relasi kuasa, produksi wacana, dan dinamika solidaritas digital yang berkembang di media sosial. Fokus penelitian diarahkan pada fenomena Digital Asabiyyah, yaitu terbentuknya solidaritas kelompok berbasis jaringan digital yang berkontribusi terhadap polarisasi opini publik dan kontestasi makna di ruang siber. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berita daring, unggahan media sosial, pernyataan resmi pemerintah, serta berbagai respons publik yang muncul terkait kontroversi keterlibatan homeless media dalam program komunikasi strategis negara pada periode Mei 2026. Data yang terkumpul kemudian dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan isu kooptasi media independen, pembentukan opini publik, dan interaksi antarkelompok dalam ekosistem komunikasi digital.

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough yang mencakup tiga dimensi analisis, yaitu dimensi teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik sosiokultural (makro) (Sari, Setyonegoro, & Priyanto, 2025; Manullang, Chairunisa, & Dalimunthe, 2026). Dimensi mikro digunakan untuk mengidentifikasi pilihan bahasa, istilah, dan konstruksi naratif yang digunakan oleh aktor negara maupun media independen. Dimensi meso difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana dalam jaringan media sosial,

sedangkan dimensi makro digunakan untuk menelaah konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi munculnya konflik wacana tersebut. Untuk memperkuat interpretasi, penelitian ini memadukan perspektif Sosiologi Komunikasi, teori Network Society dari Manuel Castells, dan konsep Asabiyyah Ibnu Khaldun guna menjelaskan hubungan antara kekuasaan, jaringan digital, dan pembentukan solidaritas kelompok di era komunikasi siber.

Pembahasan/Hasil

A. Genealogi Asabiyyah: Dari Ibnu Khaldun menuju Digital Asabiyyah

Diskursus mengenai kohesi sosial tidak dapat dilepaskan dari fondasi pemikiran Ibnu Khaldun, sosiolog dan sejarawan revolusioner pada abad ke-14. Melalui magnum opusnya, Muqaddimah, Ibnu Khaldun merumuskan konsep Asabiyyah sebagai kekuatan paling fundamental yang menggerakkan roda peradaban. Secara leksikal dan teoretis, asabiyyah merepresentasikan sentimen kelompok, solidaritas sosial, dan kesadaran komunal yang mengikat individu-individu menjadi satu entitas kolektif yang tak terpisahkan (Harriyani, 2024; Pramono, Latief, & Setiawan, 2024). Pada masa pramodern, asabiyyah terbangun dari kesamaan garis keturunan (nasab), persekutuan suku, atau pengalaman hidup bersama di wilayah nomaden yang keras.

Ibnu Khaldun menyajikan analisis multidimensional bahwa asabiyyah memiliki siklus hidup. Ia bermula dari komunitas pinggiran yang solid, memobilisasi kekuatan politik untuk merebut atau mendirikan negara, mencapai puncak kemakmuran, sebelum akhirnya terjerumus ke dalam dekadensi moral, fragmentasi faksi, dan kehancuran institusional. Teori siklus ini sangat relevan digunakan untuk membedah ketimpangan sosial dan dinamika politik di era disrupsi digital saat ini (Hafis, Hisbullah, Ibrahim, & Yusrizal, 2025).

Dalam konteks modernitas dan teknologi, asabiyyah telah mengalami transmutasi menjadi Digital Asabiyyah. Generasi digital (Gen Z dan milenial) tidak lagi membangun solidaritas berbasis batas geografis, melainkan melalui agregasi sentimen di dalam jaringan platform siber (Fanani, Zakaria,

& Pratomo, 2025). Ikatan kekerabatan digantikan oleh ikatan algoritma. Kesamaan minat, kesamaan pengalaman tertindas secara struktural (misalnya isu ekonomi atau penolakan kebijakan publik), dan kesamaan preferensi hiburan, telah menjadi katalisator terbentuknya digital asabiyyah yang tangguh.

Digital asabiyyah menyimpan potensi dualistik. Di satu kutub, ia menjadi motor penggerak keadilan sosial; contohnya adalah gerakan kampanye pro-Palestina yang sangat terorganisir berkat solidaritas komunal di grup-grup WhatsApp dan ruang percakapan TikTok. Di kutub yang berlawanan, digital asabiyyah sangat rentan mengalami purifikasi pandangan secara berlebihan. Tanpa literasi kritis, solidaritas ini bertransformasi menjadi fanatisme tribalisme baru yang melahirkan polarisasi sosial, di mana masyarakat terpecah menjadi faksi-faksi dogmatis yang saling menegasikan rasionalitas lawan diskursusnya (Zabieno, Damayanti, & Abdullah, 2025).

B. Sosiologi Komunikasi: Arsitektur Echo Chamber dan Filter Bubble

Eksistensi digital asabiyyah tidak lepas dari arsitektur ekosistem media sosial yang sengaja dirancang oleh kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism). Kajian sosiologi komunikasi modern menggarisbawahi bahwa platform-platform media sosial tidak dirancang sebagai ruang publik (public sphere) yang netral secara diskursif ala Habermas, melainkan sebagai mesin amplifikasi atensi untuk memaksimalkan keuntungan komersial (Fajarini, Yuliani, & Kurniawati, 2025).

Mekanisme utama yang mendorong fragmentasi ini adalah Filter Bubble (Gelembung Penyaring) dan Echo Chamber Effect (Efek Ruang Gema). Algoritma dengan kecerdasan buatan menyaring informasi dan menyajikan konten komodifikasi yang secara spesifik sejalan dengan keyakinan apriori, sejarah pencarian, dan bias kognitif masing-masing pengguna. Dalam kondisi filter bubble, pengguna diisolasi dari pandangan yang bertentangan, yang menyebabkan realitas mereka menyempit (Ali & Eriyanto, 2021; Annas, Petranto, & Pramayoga, 2019).

Ketika sekelompok pengguna dengan gelembung yang sama saling berinteraksi secara eksklusif dalam sebuah akun homeless media, terbentuklah echo chamber. Di dalam ruang gema ini, klaim-klaim tertentu direpetisi, divalidasi, dan diamplifikasi secara komunal tanpa adanya pengujian silang terhadap fakta. Echo chamber adalah inkubator sempurna bagi radikalisasi digital asabiyyah (Raza, Aulia, & Sopian, 2025). Dalam konteks wacana publik otoritas negara, upaya menyisipkan propaganda politik secara rahasia ke dalam echo chamber organik milik homeless media adalah bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi yang bertujuan untuk merekayasa persetujuan kolektif (manufacturing consent) dari basis massa yang tidak sadar sedang dipengaruhi.

C. Masyarakat Jejaring (Network Society) dan Arsitektur Kekuasaan Komunikasi

Untuk membedah motivasi dominasi otoritas secara struktural, karya sosiologis Manuel Castells memberikan instrumen analitis yang esensial. Melalui bukunya Communication Power (2009), Castells mengelaborasi bahwa kita kini hidup dalam Network Society (Masyarakat Jejaring), sebuah formasi sosial di mana struktur utama diorganisasikan di sekitar jaringan informasi digital global (Anggara & Pratama, 2019). Castells menempatkan komunikasi sebagai sumber kekuatan paling imperatif di masyarakat kontemporer.

Dalam teorinya, manusia tidak lagi sekadar menjadi target pasif dari media massa institusional, melainkan telah memiliki kemampuan mass self-communication (komunikasi massa mandiri). Melalui platform seperti Instagram, X, atau YouTube, individu dan homeless media dapat mengirimkan pesan kepada massa secara global, namun dengan kendali penuh atas produksi pesan tersebut (self-directed), distribusinya (self-generated), dan konsumsinya (self-selected).

Castells merumuskan tipologi kekuasaan di era jejaring ke dalam empat hierarki struktural:

Tipologi Kuasa Castells	**Definisi Konseptual**	**Implikasi Praktis dalam Konteks Otoritas dan Media**
Networking Power	Kekuasaan aktor inti di dalam jaringan global untuk memasukkan (inklusi) atau menolak (eksklusi) aktor lain dari partisipasi dalam jaringan tersebut.	Keputusan pemerintah menentukan siapa yang dikategorikan sebagai "mitra resmi" atau "buzzer ilegal".
Network Power	Kekuasaan atas standar, protokol, dan aturan teknis yang memaksa peserta jaringan untuk mematuhi sistem logis tertentu.	Pemaksaan "aturan jurnalistik konvensional" kepada homeless media yang sejatinya memiliki metode kurasi mandiri.
Networked Power	Kekuasaan dari aktor-aktor dominan tertentu di atas aktor lain yang berada di dalam jaringan yang sama, berbasis pada hierarki modal atau otoritas.	Pengaruh asimetris yang dimiliki pejabat Bakom RI (otoritas formal) berhadapan dengan kreator konten sipil.
Network-making Power	Bentuk kekuasaan paling mutlak; kemampuan aktor hegemonik untuk merancang, membentuk, dan memprogram ulang (programming) nilai suatu jaringan, serta menautkan atau memutus (switching) dua jaringan yang berbeda.	Upaya nyata negara untuk menyambungkan (switching) agenda pemerintah ke dalam jaringan audiens organik homeless media (upaya programming minda publik).

Fenomena perlawanan komunitas sipil terhadap dominasi ini dikonseptualisasikan oleh Castells sebagai Counter-power (Kekuasaan Tandingan). Counter-power adalah kapasitas dari aktor sosial untuk menentang kuasa hegemonik yang tertanam di institusi dominan dengan cara mencoba memprogram ulang jaringan (menciptakan narasi penolakan) dan mengganggu fungsi switches dominan tersebut untuk menggantinya

dengan nilai alternatif (seperti kampanye transparansi dan penolakan hoaks struktural).

Untuk membedah wujud manifestasi kekuasaan secara konkret dalam bahasa komunikasi politik Bakom RI, metodologi yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. AWK dibangun atas fondasi filosofis bahwa bahasa adalah sebuah praktik sosial yang tidak pernah netral secara ideologis. Teks, lisan maupun tulisan, senantiasa memiliki relasi dialektis dengan struktur kekuasaan (Sari, Setyonegoro, & Priyanto, 2025).

Fairclough merumuskan pisau analisis wacana yang komprehensif ke dalam model tiga dimensi atau Three-Dimensional Model:

1. Dimensi Teks (Mikro/Linguistik): Menganalisis wujud intrinsik bahasa seperti diksi, leksikon, sintaksis, metafora, pengandaian, dan modalitas untuk mendeteksi jejak-jejak ideologis yang diselundupkan produsen teks.
2. Dimensi Praktik Wacana (Discursive Practice / Meso): Menganalisis rantai sirkulasi teks; mencakup tahapan bagaimana teks diproduksi oleh suatu institusi, bagaimana teks tersebut didistribusikan ke audiens massal, dan bagaimana teks dikonsumsi, ditafsirkan, serta direproduksi oleh khalayak.
3. Dimensi Praktik Sosiokultural (Social Practice / Makro): Menganalisis kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan yang makro yang melatarbelakangi, memotivasi, dan dibentuk oleh peristiwa kewacanaan tersebut. Dimensi ini menguak pertarungan hegemoni antar-kelas atau antar-ideologi.

D. Dinamika Konteks Kasus: Orkestrasi Hegemoni dan Kontroversi Komunikasi Publik

Sebelum mengaplikasikan pisau bedah Analisis Wacana Kritis, rekonstruksi historis dan rekam jejak peristiwa sangat krusial untuk memetakan aktor-aktor yang berlaga dalam arena sirkulasi diskursus. Kontroversi homeless media ini adalah eskalasi dari kegelisahan struktural negara dalam merespons realitas komunikasi yang tidak lagi terkontrol.

Berdasarkan kompilasi laporan dan rilis publik, gejolak ini bermula dari perombakan strategis (reshuffle) jajaran pejabat komunikasi pada April 2026. Di titik inilah arsitektur komunikasi Istana berganti haluan dari paradigma responsif-pasif menuju pola yang sangat "ofensif-penetratif". Figur sentral yang ditunjuk memimpin lembaga yang baru dibentuk (atau direstrukturisasi), Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, adalah Muhammad Qodari. Penempatan tokoh dengan latar belakang ahli strategi survei dan perancang opini pemenangan politik ini mengisyaratkan keseriusan dan ambisi absolut otoritas negara untuk tidak sekadar "berbicara" atau menyampaikan kinerja, namun untuk memobilisasi dan mendominasi narasi di setiap jengkal ruang percakapan publik (echo chambers). Lahirlah doktrin tak tertulis yang dikarakterisasi sebagai "your words against my words" sebuah postulat bahwa tidak boleh ada narasi oposisi sipil yang mendominasi tanpa dipukul balik oleh narasi hegemonik negara secara total.

Kronologi konflik meruncing pada pekan pertama Mei 2026. Menurut keterangan pasca-krisis, pada hari Selasa, 5 Mei 2026, jajaran Bakom RI menerima permohonan audiensi dari sebuah kolektif bernama Indonesia New Media Forum (INMF). Dalam forum pendahuluan ini, INMF menyerahkan sebuah berkas presentasi pemetaan industri bertajuk "New Media Forum 2026", yang mencantumkan nama-nama entitas media sosial sebagai representasi lanskap homeless media secara umum.

Tanpa proses verifikasi kolaboratif terkait ikatan hukum antarpihak, keesokan harinya Rabu, 6 Mei 2026, Qodari menggelar konferensi pers mingguan Bakom RI. Di hadapan media massa arus utama, Qodari meluncurkan wacana bahwa Bakom RI secara resmi telah menggandeng para homeless media yang tergabung dalam New Media Forum sebagai "mitra strategis" untuk amplifikasi program Presiden (Kanal YouTube Resmi, 2026).

Untuk melegitimasi klaimnya, Qodari merapalkan daftar ekstensif akun-akun yang notabene merupakan entitas digital asabiyyah mandiri, antara lain: Folkative, Indozone, Dagelan, Infipop, USS Feeds, Volix, Kok Bisa?, Ngomongin Uang, Big Alpha, Menjadi Manusia, Bapak-bapak ID

(Bapak2ID), Taubatters, Pandemic Talks, Kawan Hawa, Indomusikgram, Creativox, CXO Media, Narasi, dan puluhan entitas lainnya. Akun-akun ini memiliki pengikut agregat yang mencapai puluhan juta akun dan memegang kendali atas relung kultural yang berbeda dari diskursus ekonomi, satir politik, gaya hidup ayah muda, edukasi milenial, hingga keluhan kelas pekerja metropolitan.

Transmisi wacana kooptasi ini menyebar laksana api liar di ruang siber. Reaksi instan lahir bukan dari pers tradisional, melainkan langsung dari audiens dan pendiri homeless media tersebut. Sejumlah akun raksasa mendeklarasikan perlawanan. Pendiri Bapak2ID, James Jan Markus, misalnya, menyampaikan bantahan terbuka kepada publik: "Beritanya tidak benar, dan kami tidak pernah menghadiri acara yang disebutkan." Klarifikasi dari para aktor digital ini menghancurkan bangunan narasi yang baru dikonstruksi otoritas kurang dari 24 jam (Berau Terkini, 2026).

Merespons krisis hegemoni yang gagal ini, Bakom RI pada Kamis dan Jumat, 7–8 Mei 2026, melakukan langkah mitigasi yang defensif. Plt. Deputi Kemitraan Bakom RI, Kurnia Ramadhana, merilis pernyataan tertulis yang meralat klaim awal. Ia memanifestasikan wacana korektif bahwa pertemuan tersebut sekadar silaturahmi perkenalan industri, bahwa penyebutan nama akun semata-mata menyalin dokumen INMF, dan menegaskan bahwa "tidak ada kontrak, arahan redaksional, atau kerja sama yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah" (Tempo.co, 2026b). Pertarungan wacana selama tiga hari ini merepresentasikan gesekan ekstrem antara sentralisasi kuasa politik versus desentralisasi kuasa media.

E. Analisis Wacana Kritis (AWK): Membedah Anatomi Hegemoni Ruang Siber

Menerapkan pisau bedah 3D Model dari Norman Fairclough pada kumpulan teks, peristiwa kewacanaan, dan konteks politik ini membuka tabir manipulasi wacana yang dilakukan aktor negara. Pembahasan dirunut dari tingkatan makro yang membentuk pola interaksi, menuju level meso yang mengamati sirkulasi konflik, hingga berakhir pada level mikro untuk membongkar ideologi tersembunyi dalam frasa dan leksikon.

1. Analisis Makro: Praktik Sosiokultural dan Kegagalan Etika E-Government

Pada tingkat praktik sosiokultural, kontroversi upaya pelibatan homeless media mencerminkan kegelisahan ontologis dari negara dalam menghadapi ekosistem kemasyarakatan yang tidak lagi bergantung padanya. Dalam teori siklus asabiyyah Ibnu Khaldun, negara pada akhirnya akan memasuki fase dekadensi; di mana soliditas penguasa dengan akar rumput memudar karena ketimpangan struktural, gaya hidup elitis para birokrat, dan kegagalan pelayanan publik dasar (Harriyani, 2024).

Penelitian kontemporer mengenai implementasi digital di Indonesia (termasuk kajian yang menganalisis kegagalan transformasi digital pemerintah) mengonfirmasi premis ini. Transformasi tata kelola yang dijanjikan kerap kali tidak lebih dari sekadar pemolesan citra digital (hiper-realitas) tanpa menyentuh esensi keadilan sosial ekonomi (Gussela & Sulastri, 2025; Hidayat & Guntur, 2025). Ketika asabiyyah kebangsaan yang diorkestrasi oleh otoritas hancur akibat defisit kepercayaan (trust deficit), publik mengalihkan loyalitas dan afeksi sosial mereka menuju digital asabiyyah sekunder di platform homeless media independen yang kerap mempraktikkan jurnalisme korektif (corrective journalism) dan menjadi anjing penjaga (watchdog) terhadap anomali penyelenggaraan negara. Kasus perlawanan media digital lokal terhadap estetika pembangunan palsu di ruang kreatif Bogor (Bogor Creative Center) adalah prototipe dari fungsi krusial media tanpa infrastruktur redaksional ini (Richard & Andriana, 2026).

Menggunakan kacamata Castells, kita melihat bahwa pada ranah makro, dominasi negara yang bergantung pada arsitektur komunikasi satu arah (mass communication) telah usang di hadapan teknologi mass self-communication yang digunakan oleh para kreator independen (Anggara & Pratama, 2019). Menghadapi kekuasaan audiens organik ini, negara berusaha melancarkan strategi pamungkas: merebut Network-making power.

Tabel di bawah ini memetakan integrasi Teori Castells dalam konteks Sosiokultural kontroversi ini:

Konstruksi Kekuasaan	**Tindakan Otoritas (Bakom RI)**	**Manifestasi Dampak pada Masyarakat Digital**
Programming (Memprogram ulang nilai jaringan)	Membingkai homeless media independen sebagai elemen "mitra strategis" dalam ekosistem diseminasi capaian program presiden.	Mencoba melumpuhkan otonomi redaksional dari platform satir/pop-kultur, dan mengubah posisi watchdog menjadi corong stabilitas (manufacturing consent).
Switching (Menghubungkan dua jaringan terpisah)	Mengawinkan jaringan hierarkis struktural birokrasi pemerintah dengan jaringan partisipatif otonom (echo chamber) pengikut media kultural tanpa sepersetujuan pengikutnya.	Pelanggaran batas etis (boundary violation); menyusupkan wacana elitis ke dalam arena kultural organik (digital asabiyyah) masyarakat akar rumput.

Profesor Rhenald Kasali menyatakan bahwa kemunculan homeless media bukanlah tren temporal, melainkan paralel dengan perkembangan creator economy journalism. Model bisnis mereka kini terbebas dari monopoli periklanan negara atau oligarki; melainkan disokong oleh donasi, afiliasi komunitas berbayar, dan otonomi pendanaan horizontal. Upaya struktural Bakom RI untuk "merangkul" entitas yang sejatinya telah mandiri ini adalah operasi makro untuk merekonsolidasi monopoli informasi di era kebebasan ruang siber (Olenka.id, 2026).

2. Analisis Meso: Praktik Wacana dan Dinamika Counter-Power Digital

Dimensi praktik wacana menyelidiki lanskap prosedural di mana teks beredar. Bagaimana M. Qodari (dan lembaganya) merekayasa wacana dominan, dan bagaimana ia disabotase oleh kekuatan perlawanan (counter-power) di tingkat sirkulasi wacana. Rantai wacana ini terdiri atas tiga fase krusial.

a. Proses Produksi Teks: Wacana Hegemoni Instan (Fait Accompli) — Bakom RI, menguasai akses pada mimbar media massa arus utama, memproduksi wacana kemitraan secara deklaratif pada konferensi pers

resmi. Pembacaan puluhan nama media besar secara vokal ("Folkative, Indozone, Bapak2ID…") tidak dikonstruksi sebagai undangan, melainkan sebagai keputusan yang telah mengikat (fait accompli). Praktik produksi teks ini didesain sedemikian rupa untuk menciptakan ilusi konsensus. Pemerintah berusaha mengirimkan sinyal ke seluruh audiens publik bahwa "bahkan media independen paling radikal pun kini telah tunduk menyelaraskan diri di belakang barisan program pembangunan" (Manullang, Chairunisa, & Dalimunthe, 2026).

b. Proses Distribusi, Konsumsi, dan Resistensi (Mobilisasi Counter-Power) — Di era pra-digital, proses konsumsi teks yang diproduksi pemerintah berlangsung linier, di mana publik hanya dapat menerima wacana tersebut. Namun, di bawah iklim kebebasan network society, proses konsumsi berlangsung partisipatif. Begitu berita rilis di portal media massa daring, audiens fanatik homeless media mendeteksi infiltrasi. Reaksi sosiologis masyarakat merefleksikan kepanikan kultural bahwa ruang aman (safe space) mereka akan direnggut. Wacana "Homeless media jangan jadi buzzer" meledak di algoritma media sosial (Sugiono, 2020; Mustika, 2019).

b. Menyadari kredibilitas sosial ekonominya terancam, entitas homeless media memobilisasi Counter-power (Kuasa Tandingan) secara masif. Pernyataan retorikal James Jan Markus, "Beritanya tidak benar, dan kami tidak pernah menghadiri acara yang disebutkan," adalah praktik intervensi sirkulasi wacana yang sangat sukses. Counter-power ini bekerja dengan cara memutuskan koneksi (switching off) antara identitas platform mereka dan klaim dominan yang diusung oleh kepala badan komunikasi negara. Wacana bantahan dari kreator independen ini jauh lebih dipercayai dan diamplifikasi oleh audiens (echo chamber effect) ketimbang wacana resmi institusi pemerintahan (Raza, Aulia, & Sopian, 2025).

c. Proses Reproduksi Teks (Mitigasi Krisis Pejabat Publik) — Hancurnya legitimasi wacana pada tahap distribusi memaksa Bakom RI mereproduksi wacana klarifikasi. Plt. Deputi Kurnia Ramadhana memproduksi rilis tertulis pada Jumat (8 Mei) dengan struktur narasi

yang jauh lebih kooperatif. Teks diubah dari nada deklaratif ("kami menyambut mitra baru") menjadi nada apologia dan legal-formal ("tidak ada kerja sama atau kontrak"). Peralihan wacana defensif ini menunjukkan kemenangan pertarungan diskursif oleh kolektif digital, yang membuktikan bahwa di era kontemporer, sentralisasi kuasa komunikasi politik telah menemui senjakalanya.

3. Analisis Mikro: Dekonstruksi Leksikon, Semantik Paternalistik, dan Opresi Teks

Bidikan paling empiris dari AWK Fairclough adalah pembedahan fitur-fitur linguistik (kosakata, metafora, gramatika) dalam tuturan pihak yang berkonflik. Pemilihan diksi secara tak sadar membongkar tendensi, ideologi, dan cara pandang para aktor tersebut terhadap entitas sosial yang menjadi mitra bicaranya (Manullang, Chairunisa, & Dalimunthe, 2026; Noor, 2018).

Tabel Analisis Tekstual Kontroversi Homeless Media:

Objek Teks / Leksikon	**Aktor Penutur**	**Dekonstruksi Ideologis (Analisis Semantik & Sintaksis)**	**Implikasi Psiko-Politik**
"Homeless media" (Media Tunawisma)	M. Qodari & Rilis Bakom RI	Memiliki beban semantik ganda. Dalam sosiologi barat (cth: Sahlins), ini deskripsi netral ketiadaan infrastruktur fisik. Namun, dalam konteks tuturan penguasa birokrasi Indonesia, "tunawisma/terlantar" menyiratkan cacat struktural. Penggunaan istilah ini merupakan metafora	Upaya mereduksi kekuatan otonomi kultural media baru, menempatkan mereka pada hierarki yang inferior (yang dibantu) di hadapan kebesaran negara (pemberi bantuan).

		paternalistik: entitas independen dianggap sebagai subjek marginal yang miskin eksistensi legal, yang oleh karenanya perlu "diselamatkan", "diberi rumah", dan "diakomodasi" ke dalam asuhan struktur patronase negara (Harriyani, 2024).	
"Buzzer" (Pendengung)	Komunitas Netizen & Audiens Digital	Bentuk peyorasi leksikal yang merepresentasikan antipati terhadap kapitalisasi kuasa wacana (Sugiono, 2020; Miqdad, 2024). "Buzzer" tidak lagi berarti agen promosi komersial, melainkan menjadi penanda stigmatis (penjahat moral) bagi entitas mana pun yang melacurkan integritas opininya demi uang dan agenda oligarki.	Pembentukan identitas eksklusi. Digital Asabiyyah menolak buzzer untuk memagari batas moral in-group (kita yang jujur) terhadap out-group (mereka yang dibayar).
"Teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media..."	M. Qodari (Kepala Bakom RI)	Klausa ini mengandung presuposisi hierarkis yang elitis (Sari, Setyonegoro, & Priyanto, 2025). Kata "berusaha" mereduksi rekam jejak masif entitas media tersebut menjadi upaya yang belum paripurna.	Refleksi dominasi epistemologis negara yang masih mengagungkan bentuk institusi kuno dan formalitas birokrasi sebagai satu-satunya tolak ukur

		“Bertransformasi” menyiratkan pergerakan dari fase primitif (tunawisma) menuju tatanan yang diakui secara peradaban (yang dinaturalisasi oleh negara). Otoritas negara secara arogan menempatkan diri sebagai arbiter (hakim) yang berhak memberikan validasi “new media”.	eksistensi sosial.
“INMF menjawab bahwa mereka punya metode yang disebut 'verifikasi'“	Rilis Bakom RI (Kurnia Ramadhana)	Tanda kutip tunggal pada kata verifikasi (dalam dokumen rilis) mengimplikasikan sarkasme atau keraguan dari pembuat teks (negara) terhadap kompetensi dan standar metodologis media non-konvensional. Negara secara teks mendisiplinkan media baru dengan tolok ukur media tradisional (cover both sides) (Noor, 2018).	Pendelegitimasian standar jurnalisme warga.
“Beritanya tidak benar, dan kami tidak pernah menghadiri...”	James Jan Markus (Bapak2ID)	Menggunakan kalimat deklaratif negatif (negative declarative) yang tegas, tanpa tedeng aling-aling dan tanpa penghalusan khas birokrat (seperti: “miskomunikasi”). Modalitas kebenaran	Penegasan otonomi. Memecah hegemoni naratif dengan menuduh otoritas melakukan manipulasi informasi secara

		absolut (Manullang, Chairunisa, & Dalimunthe, 2026).	vulgar.

Analisis leksikal ini mengungkap relasi kekuasaan yang asimetris namun rapuh. Otoritas birokrasi, yang masih terjebak pada definisi otoritas gaya lama, menggunakan bahasa yang penuh bimbingan hegemonik (paternalistic semantics), seolah berhadapan dengan rakyat yang belum tercerahkan. Sebaliknya, masyarakat siber dan pembuat konten, yang bersenjatakan independensi finansial ekonomi kreator, merespons dengan bahasa yang menelanjangi ilusi dominasi tersebut.

F. Tinjauan Etis Komunikasi Islam: Menangkal Hegemoni Asabiyyah Buta

Tulisan ini disusun tidak semata-mata untuk membedah instrumen sosiologi politik, melainkan juga menautkannya dengan paradigma filsafat dan nilai moral yang berfokus pada Kajian Komunikasi Islam (Dailami, 2019). Etika komunikasi Islam menawarkan landasan normatif yang imperatif bagi seluruh entitas baik aparatus pemerintah yang memegang wewenang birokrasi maupun produsen media sosial partisipatif untuk membangun interaksi sosial yang sehat.

Fenomena infiltrasi homeless media oleh instrumen negara secara klandestin merupakan manifestasi yang bertabrakan dengan fundamental komunikasi profetik. Dua prinsip dasar yang dilanggar dalam kasus ini adalah Qaulan Sadida (perkataan yang benar, jujur, tertata) dan pengingkaran terhadap etos kampanye yang tulus (Mulyono & Azhar, 2024; Implementasi Prinsip Komunikasi Islam Qaulan Sadida, 2024).

Komunikasi politik atau penyampaian program capaian pemerintah, sejatinya sah dalam diskursus Islam asalkan dilakukan secara transparan. Kajian mengenai etika komunikasi dalam Islam menekankan prinsip Ikhlas (keikhlasan) bahwa penyebarluasan gagasan atau kampanye harus berlandaskan pada ketulusan motivasi dan kemurnian niat untuk menegakkan realitas obyektif tanpa bumbu muslihat (Parhan, Jenuri, & Islamy, 2021). Mengupayakan kooptasi secara terselubung menggunakan

sarana komunitas echo chamber organik milik orang lain adalah sebentuk penipuan kognitif. Tindakan tersebut mengaburkan batas antara konten hiburan/opini independen dengan muatan sponsor politik (state-sponsored propaganda), sehingga menciderai kemampuan khalayak untuk melakukan Tabayyun (verifikasi fakta secara saksama) karena informasi asal (source of truth) telah disamarkan (Noor, 2018).

Lebih mendalam, bahaya manipulasi informasi ini berkorelasi kuat dengan kerusakan arsitektur digital asabiyyah. Dalam konsepsi sejarah peradaban Ibnu Khaldun, asabiyyah merupakan motor yang menyatukan masyarakat. Namun, Islam secara esensial menolak bentuk asabiyyah (fanatisme golongan) yang membuta, irasional, dan mencerabut esensi keadilan (al-adl) (Pramono, Latief, & Setiawan, 2024). Ketika homeless media diposisikan layaknya prajurit komersial (buzzer) untuk menekan nalar kritis audiens di dalam ruang gema mereka, publik rentan terjebak dalam pusaran sentimen faksi yang sangat destruktif.

Alih-alih mendistribusikan wacana pembangunan yang mencerdaskan nalar masyarakat madani (civil society), intervensi otoritarian pada media komunal hanya akan memantik radikalisasi kebencian antar-kelompok di ruang media sosial. Digital asabiyyah yang dibina dengan manipulasi dan hoaks struktural pada akhirnya akan memicu kehancuran (fase fall of civilization dalam siklus Khaldun) dari integrasi sosial bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi berlandaskan bi-hikmah (kebijaksanaan) amat mendesak diterapkan, di mana pesan harus didiseminasi dengan cara yang bermartabat, menghormati otonomi target penerima pesan (mad'u), dan tidak menggunakan hegemoni koersif melalui networking power yang curang (Dailami, 2019).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi ekologi komunikasi digital telah melahirkan konfigurasi kekuasaan baru yang menggeser dominasi aktor komunikasi konvensional melalui kemunculan homeless media dan kurator digital yang memiliki otonomi kultural serta ekonomi yang kuat. Berdasarkan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, temuan

penelitian menunjukkan bahwa upaya Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) untuk mengintegrasikan media independen ke dalam strategi komunikasi negara pada Mei 2026 mencerminkan krisis hegemoni makna di era digital. Pada tingkat makro, praktik tersebut merepresentasikan usaha negara untuk memperoleh network-making power guna mengendalikan konstruksi realitas publik; pada tingkat meso, muncul resistensi kuat dari komunitas digital yang mempertahankan ruang diskursus dan identitas kolektif mereka; sedangkan pada tingkat mikro, penggunaan bahasa yang paternalistik dan elitis memperlihatkan masih dominannya paradigma komunikasi top-down dalam birokrasi negara. Dalam perspektif Sosiologi Komunikasi Islam, praktik kooptasi naratif yang tidak transparan bertentangan dengan prinsip qaulan sadida dan berpotensi merusak integritas ruang publik. Oleh karena itu, penguatan transparansi, penghormatan terhadap otonomi media independen, serta pengakuan atas hak publik untuk mengakses dan memproduksi informasi secara bebas menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya ekosistem komunikasi digital yang demokratis, adil, dan bermartabat di era siber.

Daftar Pustaka

Ali, D. J., & Eriyanto. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 268–283. https://doi.org/10.22146/jsp.58199

Anggara, S., & Pratama, H. S. (2019). Masyarakat jejaring, media sosial, dan transformasi ruang publik: Refleksi mengenai fenomena Arab Spring dan "Teman Ahok". *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 9(3), 241–255. https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241

Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20(2), 111–126. https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006

Antara. (2026). *Transformasi komunikasi publik di era netizen ekspresif.* ANTARA News.

Berau Terkini. (2026). *Ramai polemik Bakom gandeng New Media, ini pengertian homeless media.* Berau Terkini.

https://berauterkini.co.id/ramai-polemik-bakom-gandeng-new-media-ini-pengertian-homeless-media/

Dailami, I. (2019). Komunikasi secara bi al-hikmah dalam al-Qur'an. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 2(1), 21–32. https://doi.org/10.22373/jp.v2i1.5069

Dewantara, J. A., Syamsuri, Wandira, A., Afandi, A., Hartati, O., Cahya, N., Sapitri, P., & Nurgiansah, T. H. (2022). The role of buzzers in social media in guiding public opinion regarding political choices. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 681–694. https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.8103

Fajarini, S. D., Yuliani, F., & Kurniawati, J. (2025). Peran algoritma media sosial dalam membentuk filter bubble dan echo chamber di kalangan milenial dan Gen Z Kota Bengkulu. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)*, 6(1), 205–226. https://doi.org/10.36085/jsikom.v6i1.8456

Fanani, A. F., Zakaria, M. F., & Pratomo, H. W. (2025). Asabiyah and social inequality in the digital age: An Ibn Khaldunian perspective on TikTok culture in Indonesia. *Jurnal Adabiyah*, 25(2). https://doi.org/10.24252/jad.v25i2a13

Gussela, M. D., & Sulastri, D. (2025). Transformasi digital dalam fungsi pengawasan Ombudsman: Implementasi e-government untuk pelayanan publik. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(2), 101–118. https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.51390

Hafis, A., Hisbullah, M. A., Ibrahim, M., & Yusrizal. (2025). Broken bonds: How capitalism, globalization, and technology erode 'Asabiyyah. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(2), 289–308. https://doi.org/10.14421/pa3sh156

Harian Disway. (2026). *Bakom RI gandeng media homeless jadi mitra pemerintah, ini daftarnya!* Harian Disway. https://harian.disway.id/read/945459/bakom-ri-gandeng-media-homeless-jadi-mitra-pemerintah-ini-daftarnya

Harriyani, H. (2024). Kesadaran Gen Z terhadap dinamika sosial-politik di Indonesia: Perspektif teori Ashabiyyah Ibnu Khaldun. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 137–163. https://doi.org/10.14421/tqasrf92

Hidayat, M. T., & Guntur, Y. S. (2025). Transformasi digital melalui implementasi e-government pada organisasi sektor publik. *Majalah Ekonomi*. https://doi.org/10.36456/64gy9k92

Implementasi prinsip komunikasi Islam Qaulan Sadida Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan moderasi beragama. (2024). *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 6(2), 467–477. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i2.8152

Jati, W. R. (2016). Aktivisme kelas menengah berbasis media sosial: Munculnya relawan dalam Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 147–162. https://doi.org/10.22146/jsp.24795

Kanal YouTube Resmi. (2026, Mei 14). *Bakom RI umumkan 39 homeless media jadi mitra pemerintah* [Video].

Kompas.com. (2026). *Ketika Istana berupaya beri rumah dan mengooptasi "homeless media".* Kompas Nasional. https://nasional.kompas.com/read/2026/05/11/06300091/ketika-istana-berupaya-beri-rumah-dan-mengooptasi-homeless-media-

Manullang, E. R., Chairunisa, H., & Dalimunthe, S. F. (2026). Konstruksi ideologi dalam wacana video "Darurat Militer": Analisis wacana kritis pendekatan Norman Fairclough. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(2), 647–656. https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.7187

Miqdad, M. (2024). Literature review: Buzzer politik dan pengembangan opini di media sosial di Indonesia. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 689–698. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.231

Mulyono, & Azhar. (2024). Analisis komunikasi: Efektivitas Qaulan Sadida terhadap dinamika interpersonal. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(1), 1006–1011. https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.594

Mustika, R. (2019). Pergeseran peran buzzer ke dunia politik di media sosial. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 2(2), 144–151. https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60

Noor, M. U. (2018). Penilaian kualitas informasi sebagai bentuk sikap tabayyun ketika menerima informasi di sosial media dan internet. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 2(1), 33–40. https://doi.org/10.17977/um008v2i12018p033

Olenka.id. (2026). *Menatap masa depan homeless media: Fenomena sementara atau tumbuh keberlanjutan?* https://olenka.id/menatap-masa-depan-homeless-media-fenomena-sementara-atau-tumbuh-keberlanjutan

Parhan, M., Jenuri, & Islamy, M. R. F. (2021). Media sosial dan fenomena hoax: Tinjauan Islam dalam etika berkomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59–80. https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887

Pramono, M. F., Latief, M., & Setiawan, A. S. R. (2024). Asabiyyah concept according to Ibn Khaldun's: An effort to overcome Islamic political problems in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 13(3), 785–792. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11712

Raza, A. M., Aulia, N., & Sopian, S. (2025). The echo chamber effect: Analisis sosiologis peran algoritma media sosial dalam pembentukan solidaritas dan polarisasi kelompok di Indonesia. *Jurnal Bincang Komunikasi*, 3(1), 38–52. https://doi.org/10.24853/jbk.3.1.2025.38-52

Richard, I., & Andriana, D. (2026). The construction of the Bogor Creative Center issue as an antithesis to development narratives: A critical discourse analysis on homeless media @Kisruhdotcom. *International Journal of Social Science and Human Research*, 9(5), 3493–3506. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v9-i5-08

Sari, W. P., Setyonegoro, A., & Priyanto, P. (2025). Analisis wacana kritis Norman Fairclough pada pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di media Antaranews.com. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, dan Sastra*, 3(1), 1–14. https://doi.org/10.59638/isolek.v3i1.417

Sugiono, S. (2020). Fenomena industri buzzer di Indonesia: Sebuah kajian ekonomi politik media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 47–66. https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250

Tempo.co. (2026a). *Govt meets with 'homeless media' representatives.* En.tempo.co. https://en.tempo.co/read/2102182/govt-meets-with-homeless-media-representatives

Tempo.co. (2026b). *Bakom: No partnership deal with 'homeless media'.* En.tempo.co. https://en.tempo.co/read/2102552/bakom-no-partnership-deal-with-homeless-media

Zabieno, A. S., Damayanti, D., & Abdullah, A. Z. (2025). The role of AI, filter bubbles, and echo chambers in political and religious polarization on social media. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 102–118. https://doi.org/10.21274/dinamika.2025.25.2.102-118